



Judul : Pembajakan kapal di Somalia, komisi I DPR harap, 4 sandera WNI segera dibebaskan
Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembajakan Kapal Di Somalia Komisi I DPR Harap, 4 Sandera WNI Segera Dibebaskan

ANGGOTA Komisi I DPR Syamsu Rizal mendorong Pemerintah mengedepankan pendekatan humanis menyelamatkan empat WNI anak buah kapal (ABK) tanker MT Honour 25. Mereka diduga disandera para perompak usai pembajakan di perairan sekitar Hafun, Somalia, Selasa (21/4/2026).

Dari informasi yang diperolehnya, Pemerintah tengah mengupayakan pembebasan dengan pendekatan komprehensif, membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, sinergi semua pihak sangat dibutuhkan agar proses pembebasan para WNI segera tuntas.

DPR, kata Syamsu, turut mendorong Pemerintah mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan keselamatan para sandera sebagai prioritas utama. Tempuh berbagai cara melalui diplomasi resmi maupun pendekatan aktor non-negara. "Itu wajib dilakukan demi memastikan empat warga negara kita bisa kembali dengan selamat," harapnya, kemarin.

Dia menekankan, perlindungan terhadap WNI di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar oleh siapa pun. Karena itu, Pemerintah wajib memantau perkembangan dengan mengusahakan seluruh sandera selamat termasuk warga yang ditawan perompak. Negara harus hadir nyata dalam situasi darurat yang mengancam.

Kondisi para korban di lo-

kasi penyanderaan, sambung Syamsu, saat ini dilaporkan dalam keadaan baik dan sehat. Karena itu, mereka diharapkan bisa segera dibebaskan dan kembali kepada keluarga masing-masing. "Sampai saat ini masih ada jaminan bahwa mereka tetap sehat dan diperlakukan secara layak oleh perompak," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratno menambahkan, tahun ini kasus penyanderaan kepada WNI ABK kapal asing bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya pada Januari 2026 empat WNI juga disandera di perairan Gabon. Kejadian pembajakan dan penyanderaan yang terus berulang, menunjukkan adanya celah keamanan bagi para pelaut.

Anton menyoal terusnya berulangnya kasus yang menimpa para WNI yang bekerja sebagai pelaut, khususnya di kapal berbendera asing. Karena itu, kasus penyanderaan ini harus benar-benar jadi perhatian serius Pemerintah agar tidak terus terjadi. Perlindungan bagi para pekerja migran di sektor maritim harus segera diperkuat.

Terkait situasi saat ini, Anton mendorong Pemerintah agar segera membebaskan keempat WNI dalam keadaan selamat dan sehat. Negara harus bisa bertindak tegas serta cepat untuk melindungi warganya. "Setiap orang yang bekerja di luar negeri berhak mendapat perlindungan maksimal dari Pemerintah," ujarnya. ■ PVB